

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden dan analisis, maka kesimpulan yang dapat diberikan berkaitan dengan Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut terungkap berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden hanya mencapai nilai 81,14 % berada dalam katagori baik. Kondisi pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi dapat diuraikan secara lebih detail dan terperinci dengan mengacu pada 5 prinsip akuntabilitas sebagai berikut:
 - a. Indikator akuntabilitas administrative didapat rata-rata 75,45% dan masuk dalam kategori baik.
 - b. Indikator akiuntabilitas legal/hukum didapat rata-rata 78,72% termasuk kedalam kategori baik.
 - c. Indikator akuntabilitas politik didapat rata-rata 84,38% masuk kategori sangat baik.
 - d. Indikator akuntabilitas professional didapat rata-rata 86,468% dikategorikan sangat baik
 - e. Indicator akuntabilitas moral didapat rata-rata 83,03 % dikategorikan sangat baik.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya sosialisasi pemberian informasi mendalam terhadap masyarakat tentang pelaksanaan anggaran.
 - b. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa Sukaraja dan BPD Desa Sukaraja.
 - c. Ketidaksiplinan aparat Pemerintah Desa Sukaraja dalam hal penggunaan anggaran.
 - d. Tingkat kepedulian masyarakat yang rendah terhadap kegiatan pemerintah desa.
3. Upaya yang dilakukan Kepala Desa Sukaraja dalam mengatasi hambatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa Sukaraja lebih aktif melakukan sosialisasi program program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan anggaran.
 - b. Lebih banyak melakukan musyawarah dengan BPD dan masyarakat.
 - c. Melakukan subsidi silang mengenai penggunaan anggaran dan memberikan kesempatan kepada para pelaksana anggaran untuk mengikuti kursus-kursus singkat.
 - d. Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan anggaran baik dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran.

4.2 Saran

Untuk menjawab hambatan-hambatan di atas peneliti berusaha untuk memberikan saran untuk meminimalkan permasalahan yang ada, diantaranya:

1. Menjalinkan hubungan kerja yang baik dengan cara melakukan perencanaan yang baik dari awal sampai akhir, adanya pembagian kerja serta tanggungjawab yang jelas antar pegawai, serta sesuai dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki demikian harus adanya bimbingan dan arahan pemerintah kepada bawahan *bottom up / bottom down* dan adanya pengawasan atau pengendalian kerja sesuai arah tujuan. Pengawasan ini tidak hanya dilaksanakan di akhir tetapi pengawasan dilaksanakan saat dimulainya perencanaan agar sesuai dengan tujuan awal.
2. Melakukan sosialisasi lebih mendalam seperti mengoptimalkan sarana dan prasarana fasilitas masjid, mengoptimalkan structural desa seperti RT, RW dan Kadus ke masyarakat yang ada dengan cara menginformasikan melalui surat undangan terkait kegiatan yang akan di lakukan di desa ataupun media elektronik lainnya seperti membentuk grup WhatsApp dilingkungan RT, RW dan Kadus di tempat, serta menggunkana majalah dinding sebagai papan informasi untuk masyarakat di sekitar kediaman setian RT yang ada di lingkup Desa Sukaraja.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan tentang APBDes Sukaraja yang digunakan untuk pembangunan Desa Sukaraja, penyuluhan dilakukan bisa saat berlangsungnya rapat minggon atau dilakukan terpisah dalam sebulan sekali agar bisa membentuk pemahaman masyarakat serta rasa kepercayaan kepada Pemerintahan Desa.
4. Untuk membangun kepercayaan masyarakat perlu adanya kerjasama antara pemerintah masyarakat dan swasta, tiga hal ini diperlukan untuk melaksanakan manajemen yang baik serta kepercayaan yang pada akhirnya berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat maka diperlukan unsur transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme

